

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI SD NEGERI BANYUWANGI II

Nita Wardani¹, Hildatul Uyun², Desti Putri Aryanti³, Ratna Dewi⁴, Ilham Mubarok⁵
nitawardni25@gmail.com¹, hildaulyun881@gmail.com², destiputriaryanti@gmail.com³,
dewisafarina79@gmail.com⁴, ilhamhamiemie@gmail.com⁵

Bina Bangsa

ABSTRAK

Pendidikan inklusi adalah suatu usaha untuk memberikan layanan belajar yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Banyuwangi 2 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan guru serta pihak sekolah sebagai sumber utama data. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri Banyuwangi 2 telah melaksanakan pendidikan inklusi dengan menyatukan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler tanpa memisahkan mereka. Guru melakukan adaptasi dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan menciptakan interaksi sosial yang positif di antara para peserta didik. Namun, penerapan pendidikan inklusi masih menghadapi masalah seperti keterbatasan kompetensi guru, kurangnya fasilitas pendukung, dan minimnya pemahaman dari beberapa orang tua serta masyarakat. Langkah-langkah yang diambil oleh sekolah untuk mengatasi masalah tersebut meliputi pelatihan bagi guru, peningkatan fasilitas, dan memperkuat kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pendidikan inklusi di SD Negeri Banyuwangi 2 telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih memerlukan dukungan terus-menerus agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar, Anak Berkebutuhan Khusus, Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT

Inclusive education refers to efforts aimed at delivering equitable educational opportunities for all learners, including those with exceptional needs. This research aims to explain the process of organizing education is applied at SD Negeri Banyuwangi 2 and to pinpoint both the facilitators and barriers affecting its execution. A qualitative research methodology was utilized, employing a descriptive framework. Information was gathered via interviews, observations, and documentation, focusing on teachers and school personnel as the main data providers. The analysis was carried out using an interactive model which included data reduction, presentation of data, and drawing conclusions. Findings reveal that SD Negeri Banyuwangi 2 has adopted inclusive education by incorporating students with special needs into mainstream classrooms without separation. Educators modify their teaching methods to cater to the specific requirements of individual students and foster positive interactions among all learners. Nonetheless, various obstacles persist, such as insufficient teacher expertise, lack of adequate facilities, and a gap in understanding among certain parents and community members. The school has worked to mitigate these issues through teacher training, upgrading facilities, and enhancing collaboration with parents and the local community. In summary, the rollout of inclusive education at SD Negeri Banyuwangi 2 has made notable advancements, although ongoing support is necessary to reach the best outcomes.

Keywords: Inclusive Education, Elementary School, Students With Special Needs, Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif saat ini semakin mendapat perhatian di tingkat global, seiring dengan dorongan dari berbagai organisasi internasional agar penerapannya dilakukan secara lebih serius. Sejumlah negara telah menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan regulasi yang mengatur pendidikan inklusif, yang berlandaskan pada kesepakatan hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Salamanca dan Kerangka Aksi (UNESCO, 1994) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (2006).

Terangkat dari prinsip dengan demikian, setiap anak di Indonesia berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak serta bermutu, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan pendidikan di sekolah reguler. (Muslimin dan Muqowam, 2021).

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem pendukung di setiap sekolah inklusi. Sistem tersebut meliputi pelatihan bagi guru, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, dukungan sosial dari masyarakat, serta penguatan hubungan kolaboratif antara tenaga pendidik, orang tua, dan organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar (Kantavong, 2017). Peran guru, tenaga kependidikan, dukungan dari peran serta orang tua dan masyarakat memberikan kontribusi yang berarti dalam mewujudkan penyelenggaraan sekolah inklusif yang efektif (Amalia dan Kurniawati, 2021).

Selain itu, peran pemerintah melalui penyediaan program pelatihan serta persiapan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sangat berperan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan inklusif secara optimal. Mengingat tidak seluruh peserta didik penyandang disabilitas dapat mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Luar Biasa (SLB), pemerintah berupaya menyediakan layanan pendidikan di sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka, yaitu melalui sekolah inklusi (Amalia dan Kurniawati, 2021). Seiring waktu, pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia terus mengalami peningkatan, termasuk di Sekolah Alam Ramadhani di Kediri yang telah mulai menerapkan penerapan pengembangan pendidikan inklusif yang dimulai sejak usia dini (Nurvitasari et al., 2018).

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan sekolah inklusi telah diterapkan mulai pada jenjang Sekolah Dasar (Andriyani, 2017). Sementara itu, bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus di Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan yang mendorong pengembangan pendidikan inklusif di seluruh sekolah. Kebijakan tersebut mendorong banyak kepala sekolah untuk mulai membuka kelas inklusi, serta meningkatkan kesiapan guru dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (Amka, 2019).

Di Kota Sidoarjo, sekolah inklusi telah tersebar di hampir seluruh kecamatan serta mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala (Anjarsari et al., 2018). Berbeda dengan daerah tersebut, di Singaraja, Bali, sekolah inklusi untuk anak usia dini belum tersedia, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pembelajaran bersama dalam kelas reguler dengan pendampingan tertentu (Tirtayani, 2017). Selain itu, tiga sekolah percontohan di Kota Bontang pada jenjang SD dan SMP telah menerapkan pendidikan inklusif, namun dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan (Herviani et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi sekolah inklusi di Indonesia terus mengalami perkembangan. Namun demikian, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana kemajuan pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil kajian literatur ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam upaya meningkatkan mutu

sekolah inklusi di Indonesia, mengingat setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menelaah serta memahami berbagai tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Banyuwangi 2 yang berlokasi di Desa Banyuwangi, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta, data, serta objek penelitian secara sistematis sesuai dengan konteks yang ada. Dalam kaitannya dengan fokus penelitian, temuan yang dihasilkan lebih menekankan pada pemaknaan dibandingkan pengukuran angka, bersifat fleksibel, serta dapat berkembang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dan disajikan secara deskriptif berdasarkan fakta yang ditemukan (Anggitto dan Setiawan, 2018). Pendekatan kualitatif dinilai tepat dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang berfokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri, serta kendala yang dialami pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi langsung, antara lain melalui kegiatan wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam aktivitas di lapangan. Adapun data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi data primer.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan sebelum, selama, dan setelah proses pengumpulan data, sehingga membentuk pemahaman yang menyeluruh terhadap data penelitian. Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan dan penyederhanaan informasi berdasarkan tingkat relevansinya, sekaligus mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu agar lebih terorganisasi.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, bagan, maupun hubungan antar kategori yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap akhir analisis data adalah penarikan dan pengujian kesimpulan, di mana hasil temuan diuji keabsahannya hingga diperoleh kesimpulan yang valid.

Untuk memastikan keakuratan dan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi dari sumber yang sama melalui metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Selain itu, peningkatan ketekunan dilakukan melalui pengamatan yang cermat dan berkesinambungan guna memastikan bahwa data serta urutan peristiwa tercatat secara akurat dan didukung oleh bukti yang kuat di lokasi penelitian (Sugiyono, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan sekolah inklusi pada jenjang sekolah dasar perlu dikaji secara menyeluruh untuk menilai sejauh mana pendidikan inklusif telah berjalan secara efektif serta mampu memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi merupakan bagian dari proses kebijakan publik yang berfungsi untuk melihat tingkat kebermanfaatan kebijakan bagi para pemangku kepentingan serta penerimaannya oleh masyarakat. Dalam konteks ini, dapat ditegaskan bahwa meskipun perumusan dan perencanaan kebijakan telah disusun dengan baik, tanpa pelaksanaan yang optimal, hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut akan sulit dicapai. Akibatnya, pada

tahap evaluasi sering ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara maksimal dan bahkan berpotensi menjadi hambatan bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Nurwan, 2019).

Berdasarkan konsep, prinsip, dan landasan teoretis pendidikan inklusif, SD Negeri Banyuwangi 2 telah menerapkan pendidikan inklusi sebagai wujud komitmen sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang adil serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik. Sekolah ini menerima siswa yang mempunyai perbedaan latar belakang, tingkat kemampuan, dan kebutuhan khusus dan mengintegrasikan mereka ke dalam kelas reguler tanpa menerapkan sistem pemisahan atau segregasi.

Dalam praktiknya, penerapan pendidikan inklusi di SD Negeri Banyuwangi 2 dilakukan melalui penyesuaian proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan individual peserta didik. Guru menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif, seperti penggunaan metode pengajaran yang beragam, penyesuaian tingkat kesulitan materi, serta pemberian pendampingan khusus bagi siswa yang memerlukan dukungan tambahan. Pendekatan yang digunakan sejalan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi, yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing.

Selain itu, lingkungan belajar di SD Negeri Banyuwangi 2 dirancang untuk mendukung terciptanya suasana yang inklusif. Guru berupaya membangun hubungan sosial yang positif antar siswa sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran bersama peserta didik lainnya. Integrasi sosial tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan akademik, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan keterampilan sosial, rasa percaya diri, serta sikap saling menghargai di antara seluruh siswa.

Dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah ini juga melibatkan peran orang tua dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dilakukan untuk memastikan kebutuhan siswa terpenuhi secara optimal, baik pada lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Selain itu, sekolah berupaya menumbuhkan budaya inklusif melalui penanaman nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam proses pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya.

Mengacu pada Model Teori Sistem Ekologis, implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri Banyuwangi 2 memperhatikan berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi perkembangan peserta didik. Lingkungan sekolah yang mendukung, keterlibatan keluarga, serta interaksi sosial yang positif menjadi komponen penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan inklusif. Sekolah berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap siswa merasa diterima, aman, dan memperoleh dukungan selama proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, penerapan pendidikan inklusi di SD Negeri Banyuwangi 2 menunjukkan adanya upaya nyata dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Melalui penyesuaian strategi pembelajaran, penguatan interaksi sosial, serta kolaborasi antara guru, orang tua, dan lingkungan sekolah, pendidikan inklusi di sekolah ini berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang setara, inklusif, dan mendukung perkembangan optimal seluruh peserta didik.

Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi :

1. Terbatasnya Pengetahuan serta Kompetensi tenaga pendidik

Salah satu faktor yang cukup menghalangi penerapan pendidikan inklusif adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan guru dalam menangani peserta didik yang membutuhkan layanan khusus. Munajah et al (2021) menyatakan adanya pendidik yang masih mengalami keterbatasan keterampilan dalam pada lingkungan kelas inklusi berdampak pada kurang optimalnya proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.

Ketiadaan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan menyebabkan guru kesulitan dalam mengelola kelas dengan keberagaman kebutuhan peserta didik.

2. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur

Kekurangan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi pendidikan inklusif. Berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang kelas yang adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, media pembelajaran, serta akses fisik di lingkungan sekolah, masih belum tersedia secara optimal. Penelitian yang dilakukan Ikramullah dan Sirojuddin (2020) menyatakan bahwa sebagian besar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi masih kurang dalam hal sumber daya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran inklusif.

Strategi yang tepat untuk Menyelesaikan Permasalahan:

1. Pendidikan dan peningkatan kemampuan pendidik

Untuk mengatasi masalah pemahaman dan kemampuan pendidik, pelaksanaan Pelatihan serta pengembangan profesional yang berkelanjutan sangat dibutuhkan oleh tenaga pendidik. Pelatihan khusus di bidang pendidikan inklusif di sekolah dapat memberikan dukungan kepada pendidik dalam memahami karakteristik serta kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan khusus, sekaligus meningkatkan kompetensi pedagogik dalam proses pembelajaran inklusif. Munajah et al. (2021) merekomendasikan agar pelatihan mencakup penerapan metode pembelajaran inklusif, strategi manajemen kelas, dan penggunaan media serta alat bantu pembelajaran dengan cara yang efektif.

2. Penguatan Sarana dan Infrastruktur Sekolah

Peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi. Upaya ini mencakup penyediaan ruang kelas yang sesuai bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ketersediaan media dan alat bantu pembelajaran yang sesuai, serta pemenuhan aksesibilitas fisik di seluruh area sekolah. Ikramullah dan Sirojuddin (2020) mengemukakan bahwa penyediaan infrastruktur yang menunjang pembelajaran inklusif serta memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan inklusi.

3. Penyuluhan dan Pengajaran untuk Orang Tua dan Masyarakat

Memberikan informasi dan penyuluhan kepada orang tua serta masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang inklusif berkontribusi untuk mengurangi stigma dan penolakan sosial terhadap siswa dengan kebutuhan khusus. Kegiatan penyuluhan bisa dilakukan melalui kegiatan seminar, lokakarya, serta kampanye peningkatan kesadaran yang menyoroti pentingnya dan manfaat pendidikan inklusif bagi seluruh peserta didik. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, yang didukung oleh komunikasi yang efektif antara sekolah dan keluarga, dapat memperkuat dukungan terhadap implementasi pendidikan inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan terhadap data penelitian, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Banyuwangi 2 telah berupaya mengimplementasikan program pendidikan inklusif di lingkungan sekolahnya. Pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah ini berlandaskan pada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dan menunjukkan kemampuan sekolah dalam mengembangkan layanan pendidikan tersebut secara cukup optimal. Pemerintah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melakukan penyesuaian kurikulum agar selaras dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti proses pembelajaran.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus menjadi aspek penting dalam perancangan program

pendidikan, termasuk dalam pengembangan keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup diharapkan dapat membekali lulusan agar mampu berpartisipasi dalam dunia kerja, berkompetisi secara sehat, serta menunjukkan prestasi, sehingga keberadaan mereka dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Meskipun implementasi pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman dan kompetensi guru, minimnya sarana prasarana, serta adanya penolakan dari Beberapa orang tua dan komunitas, temuan dari kajian ini mengindikasikan bahwa rintangan tersebut bisa diatasi dengan menerapkan strategi yang sesuai dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Analysis Journal of Education (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah. Vol.2 No.1 Hal 195-203.
- Kesti Anggreani (2024). Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar: Tantangan dan Strategi Efektif. Katalis Pendidikan: Jurnal Pendidikan dan Matematika. Vol.1 No.2 Hal.199-204.
- Serla Kusuma Arum (2020). Pendidikan Inklusi Sebagai Solusi Pendidikan Untuk Semua (Penerapan Pendidikan Inklusi di SDN Bromantakan 56 Surakarta). Best Journal Biology Education Science & Technology. Vol.3 No.1 Hal.120-126.
- Teni Susanti (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Pendidikan Inklusi. Vol.2 No.1 Hal.4-9.